



RENCANA STRATEGIS PPPPTK PKn dan IPS 2015 - 2019



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
PPPPTK PKn dan IPS
2014**

KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn DAN IPS) berdasarkan Permendikbud no 44 tahun 2013 tentang Rincian Tugas PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PPPPTK PKn DAN IPS berupaya memprioritaskan program program lembaga pada upaya peningkatan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, PPPPTK PKn DAN IPS merancang Rencana Strategis untuk tahun 2015 - 2019, diharapkan Renstra 2015 - 2019 ini bisa menjadi acuan untuk pengembangan dan kemajuan program di lembaga.

Malang, Mei 2014

Kepala PPPPTK PKn DAN IPS

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Filosofis Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4
C. Landasan Operasional	8
D. Dasar Hukum	15
II. ANALISIS KONDISI	17
A. Kondisi Internal	17
B. Kondisi Eksternal	23
C. Tantangan Kedepan	25
D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK PKn dan IPS	28
III. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI dan TUJUAN STRATEGIS	31
A. Visi dan Misi PPPPTK PKn dan IPS	31
B. Nilai-Nilai	37
C. Tujuan Strategis	38
D. Sasaran Strategis	39
IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PPPPTK PKn dan IPS TAHUN 2015 - 2019	40
A. Strategi PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2015 - 2019	40
B. Arah Kebijakan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2015-2019	48

V.	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PPPPTK PKn dan IPS TAHUN 2015 - 2019	51
A.	Peningkatan Layanan Pengembangan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	51
B.	Layanan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52
C.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	54
	SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPPPTK PKn dan IPS	55
VI.	A. Perencanaan	57
	B. Pelaksanaan	57
	C. Pemantauan	58
	D. Perbaikan	60

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah PTK pada SMK yang menyelenggarakan bidang keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi, Oerikanan dan Kelautan, dan Teknik Kimia	18
Tabel 2.2.	Jumlah peserta diklat berdasarkan sasaran renstra 2010-2013	18
Tabel 2.3.	Capaian Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PPPPTK PKn dan IPS Sampai dengan Tahun 2009	19
	Jumlah bahan ajar/modul	21
	Tujuan Strategis	39
	Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T1	39
	Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T2	39
	Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1) dari Tujuan Strategis 1 (T1)	42
	Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis 2 (S2) dari Tujuan Strategis 1 (T1)	44
	Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis 3 (S3) dari Tujuan Strategis 1 (T1)	44
	Pentahapan pencapaian sasaran strategis 1 (S1) dari tujuan 2 (T2)	47
	Strategi Umum	48
	Keterkaitan arah kebijakan dengan strategi umum	48
	Kegiatan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2015– 2019	50
	IKK Layanan Pengembangan Program Peningkatan PTK	51
	IKK Layanan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK	52
	IKK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	54

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kegiatan Peningkatan Kompetensi PTK	17
Gambar 2.2	Kegiatan Peningkatan Mutu SDM PPPPTK PKn dan IPS	20
Gambar 2.3	Struktur Organisasi PPPPTK	29
Gambar 3.1	Pelayanan Kepada Peserta Diklat	36
Gambar 3.2	Fokus RPJPN Pendidikan Nasional 2015-2019	38
Gambar 4.1	Penyediaan SDM yang Kompeten, Program Kerjasama dan Perencanaan Diklat	40
Gambar 4.2	Strategi pencapaian tujuan 1	41
Gambar 4.3	Strategi pencapaian tujuan 2	46
Gambar 6.1	Siklus PDCA	56
Gambar 6.2	Peningkatan Berkelanjutan	60

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran 1	Output Kegiatan Layanan Pengembangan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63
Lampiran 2	Output Kegiatan Layanan Fasilitasi Pengikatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	69
Lampiran 3	Output Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus menjadi bangsa yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global.

Undang-undang no 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1 dan 2 telah membagi fungsi antara pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, sedang pendidik adalah merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi.

Tema strategis pada periode tahun 2015 -2019 ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan. Strategi penguatan pelayanan ini merupakan milestone peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Didampingi akses pendidikan yang semakin mudah dan akuntabilitas publik yang semakin transparan, tema mutu layanan pendidikan ini akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi negara dan bangsa Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Sasaran-sasaran pendukungnya antara lain implementasi dan operasi yang optimal terhadap tata nilai, Sisdur, dan koordinasi kerja yang telah terstruktur. Pada periode ini pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan menjadi *benchmark technocracy* atau teladan di antara institusi pemerintah lainnya.

Dalam pelaksanaannya pendidikan yang bermutu dilaksanakan dan dicapai dengan melibatkan komponen pendidikan mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas, arsiparis, teknisi seperti pustakawan, laboran, dan administrator sekolah

PPPPTK PKn dan IPS Malang sebagai lembaga unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas tersebut tertuang dalam Permendikbud no 44 tahun 2013 tentang Rincian Tugas PPPPTK.

Tugas tersebut perlu dirancang secara proporsional sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perencanaan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan PKn dan IPS diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategi PPPPTK PKn dan IPS Malang tahun 2015 - 2019. Renstra sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yang dipilih secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

B. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan. Landasan filosofis bersifat normatif atau preskriptif sebab landasan pendidikan tidak berisi konsep-konsep pendidikan yang apa adanya (faktual) tetapi berisi konsep-konsep pendidikan yang ideal (yang dicita-citakan), yang disarankan oleh tokoh filsafat tertentu yang dijadikan titik tolak praktik pendidikan. Sehubungan dengan hal itu maka, landasan filosofis PTK mengacu pada filsafat Idealisme, Realisme, Pragmatisme dan Pancasila. Landasan filosofis yang terkait langsung dengan tupoksi PPPPTK PKn dan IPS antara lain adalah:

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Kepribadian manusia lahir batin adalah suatu kebutuhan yang utuh antara potensi-potensi hereditas (bawaan) dengan faktor-faktor lingkungan (pendidikan, tata nilai dan antar hubungan). Potensi manusia secara universal meliputi: potensi jasmani, akal, cipta, rasa, karsa, karya dan budi-nurani (kesadaran budi, hati-nurani). Implementasi dalam kegiatan diklat PTK pada PPPPTK PKn dan IPS adalah diklat peningkatan kompetensi guru dalam bidang pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual.

2. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Proses pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah proses belajar untuk membuat keputusan dengan memperhatikan masa depan jangka panjang dalam dimensi ekonomi, ekologi dan pembangunan yang adil bagi masyarakat. Konsep pendidikan ini mengupayakan bahwa setiap warga masyarakat harus memiliki kecakapan hidup untuk hidup di masyarakat; pembangunan ekonomi harus bertumpu pada pembangunan manusia dan modal sosial; sistem pendidikan harus mampu mewadahi orang dengan ketidakmampuan sosial atau kesulitan/cacat fisik.

Implementasi fasilitasi peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan sistem terbuka dan berkesetaraan gender. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Pola yang dikembangkan ini akan menjamin keberpihakan kepada peserta diklat yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan diklat untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

Penerapan dalam kegiatan diklat PTK pada PPPPTK PKn dan IPS diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan diklat di lokasi (*in house learning*), diklat jarak jauh (*open and distance learning*), dan bentuk diklat lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya diklat yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

3. Pengembangan Profesionalitas Berkesinambungan (PPB)

Pengembangan Profesionalitas Berkesinambungan (PPB) merupakan proses aktivitas sistematis yang dapat menambah nilai dan memelihara kapasitas profesional, terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dalam implementasinya, PPB dapat dilakukan secara mandiri, dan dapat pula difasilitasi, misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Sebagai salah satu bentuk PPB, maka diklat yang dilaksanakan merupakan proses aktivitas sistematis yang dapat menambah nilai dan memelihara kapasitas profesional, terutama dalam pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Sehingga diklat dijadikan modal bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan

dan meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan secara mandiri.

Pola kegiatan semacam ini juga mengajak peserta diklat untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kompetensi, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, dengan tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas dan kompetensinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Penerapan dalam kegiatan diklat PTK pada PPPPTK PKn dan IPS diwujudkan dalam bentuk diklat bagi Kepala Sekolah, Pengawas maupun Guru di lokasi tempat mereka bekerja. Diklat yang diikuti praktek nyata di lapangan kerja.

C.Landasan Operasional

Sesuai dengan Tema Pembangunan Pendidikan ke 3 (2015-2019) adalah "penguatan layanan pendidikan" maka Visi Kemendikbud untuk 5 tahun kedepan adalah Terselenggaranya layanan Prima Pendidikan Nasional Untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif". Untuk mencapai Visi tersebut maka dirumuskanlah Misi 5 K yaitu Meningkatkan Ketersediaan layanan, Memperluas Keterjangkauan layanan, meningkatkan Kualitas/mutu dan relevansi layanan, memperoleh Kesetaraan dalam memperoleh layanan, dan menjamin Kepastian memperoleh layanan. Kemudian dari Misi tersebut dijabarkan kedalam Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis. Dari seluruh strategi pembangunan pendidikan tersebut dirumuskan menjadi Strategi Umum dan selanjutnya dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional 2015-2015. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional merupakan landasan operasional bagi PPPPTK PKn dan IPS.

- 1. Pengembangan Profesional Berkesinambungan untuk Guru;** merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus terus ditingkatkan kompetensinya. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat profesi, kompetensi harus terus dikembangkan dan dipertajam dengan inovasi dan teknologi baru yang sesuai dengan perkembangan IPTEK. Demikian juga Guru harus terus didorong dan difasilitasi untuk mengembangkan profesionalismenya melalui kelompok kerja guru KKG / MGMP.

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dimulai dengan uji kompetensi.

2. **Peningkatan mutu lembaga**, peningkatan kompetensi guru salah satunya dipengaruhi oleh lembaga penyelenggara diklat. Untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan peningkatan mutu lembaga diklat. Peningkatan mutu lembaga PPPPTK PKn dan IPS meliputi peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM), mutu manajemen/pengelolaan, dan mutu sarana prasarana, serta sistem yang digunakan
3. **Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah**, pada era desentralisasi pendidikan ada gejala penurunan kualitas dan kompetensi pengelola pendidikan, baik yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Untuk ini, berbagai bentuk dan model pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut akan dikembangkan. PPPPTK PKn dan IPS telah melakukan peningkatan kompetensi manajerial bagi pengelola sekolah (Kepala dan wakil kepala sekolah), dan akan terus di kembangkan pada tahun-tahun berikutnya
4. **Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha**, Metodologi pendidikan yang akan dikembangkan oleh PPPPTK PKn dan IPS adalah metodologi untuk pendidikan dan latihan. PPPPTK PKn dan IPS telah dan akan terus mengembangkan metodologi diklat yang diharapkan dapat mengembangkan jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha.
5. **Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK bidang pendidikan**, kegiatan ini berupa pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan TIK. Kegiatan ini juga akan mengembangkan sistem jaringan informasi, infrastruktur dan SDM untuk mendukung implementasinya, baik untuk kepentingan manajemen pendidikan maupun proses pembelajaran. Dengan menggunakan ICT dalam diklat

reguler, diklat jarak jauh, seluruh peserta diklat akan memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.

- 6. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha,** kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan : *pertama*, bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi yang cukup besar pada masyarakat; *kedua*, kecenderungan arah pembangunan pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan; *ketiga*, sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar, akreditasi, dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan. Peran yang demikian ingin mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang mandiri (otonom), baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta). Hal ini sesuai dengan salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan dalam MP3EI, yaitu Dunia Usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja,
- 7. Koordinasi antar lembaga pusat dan daerah,** sebagai bentuk penguatan konektifitas nasional yang tertuang didalam strategi utama MP3EI, merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap lembaga yang memiliki keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai. Melalui koordinasi ini diharapkan dapat terjadi suatu sinergi yang dapat meningkatkan optimasi seluruh sumberdaya dari masing-masing lembaga. PPPPTK PKn dan IPS telah melakukan koordinasi baik secara vertikal (Badan PSDMPK dan PMP dan unit utama lainnya), maupun secara horizontal (Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, dan institut/perguruan tinggi). Koordinasi ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan.

- 8. Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup;** merupakan kegiatan strategis dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mencakup pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka pengembangan kompetensi, kepribadian, kewarganegaraan, intelektual, estetika, dan kinestik pada berbagai satuan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Tujuannya agar keluaran pendidikan memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus berkembang secara mandiri. PPPPTK PKn dan IPS sebagai lembaga yang memiliki banyak kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan kecakapan hidup sudah melaksanakan dan akan mengembangkan konsep-konsep pengembangan kecakapan hidup untuk guru SD, SMP, dan SMA.
- 9. Pengembangan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal di Setiap Kabupaten/Kota;** perluasan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 20/2003 yang secara bertahap akan dikembangkan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dalam lima tahun ke depan, diharapkan terdapat sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan di setiap kabupaten/kota. PPPPTK PKn dan IPS bermitra dengan pemerintah daerah guna membantu dan mendampingi dalam menganalisis kebutuhan pengembangan sekolah yang berbasis keunggulan lokal.
- 10. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.**

Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah *mindset* atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI), penjaminan sistem manajemen mutu, pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang. Kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- **Peningkatan sistem pengendalian Internal berkoordinasi dengan BPKP dan BPK;** untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih efektif, efisien, produktif dan akuntabel. Sistem pengendalian internal sangat penting dikembangkan guna mendeteksi penyimpangan secara dini dan menumbuhkan tanggung jawab melalui proses evaluasi diri. Sistem ini tidak hanya dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, tetapi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. PPPPTK PKn dan IPS telah membentuk SPI yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan secara internal kegiatan sehari-hari yang dilakukan. SPI ini akan terus dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satuan pengawas internal
 - **Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;** beberapa kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan, melalui: peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara
 - **Penataan regulasi pengelolaan lembaga;** menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, standar, dan aturan pelaksanaan teknis lainnya menjadi prioritas yang tidak kalah penting untuk terus disempurnakan dan dikembangkan

- **Peningkatan Pencitraan Publik;** di samping terus melakukan dan memantau program, kebijakan, dan kegiatan lembaga, juga perlu melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan perbaikan. Selain untuk melakukan sosialisasi, paparan kepada publik juga dapat menjadi sarana peningkatan citra lembaga itu sendiri. Melalui paparan tersebut, diharapkan ada masukan dari seluruh masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan. Dengan dimilikinya sertifikat ISO 9001:20008, maka ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pencitraan.

D. Landasan Hukum

1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014, sesuai amanat UUD 1945 amandemen ke-4, Pasal 31, tentang Pendidikan;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
4. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
7. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
12. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. PP No. 48 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. PP No 74 tahun 2008 tentang Guru
16. Permendiknas No.16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Depdiknas.

17. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan,
18. Permendiknas No 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
19. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
20. Ketentuan Pelaksanaan Permen no 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 tahun 2013
21. Permendikbud no 44 tahun 2013 tentang Rincian Tugas PPPPTK
22. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014

BAB II

ANALISIS SITUASI

Pokok pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dirancang dalam Renstra 2015 – 2019 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran lima tahun ke depan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip-prinsip pelaksanaan yang efektif, efisien, bermutu, relevan, berdaya saing, dan akuntabel.

Dalam upaya mengembang misi yang telah ditetapkan dan agar kebijakan serta strategi sejauh mungkin akurat, maka diperlukan analisis situasi. Dalam analisis yang terdiri dari (1) Kekuatan lingkungan internal, (2) Keterbatasan lingkungan internal, (3) Peluang lingkungan eksternal, dan (4) Tantangan lingkungan eksternal. Analisis situasi menelaah keberhasilan dan masalah-masalah yang dikelompokkan ke dalam tema-tema pokok kebijakan pendidikan, yaitu: (1). pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2). peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan (3). peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan

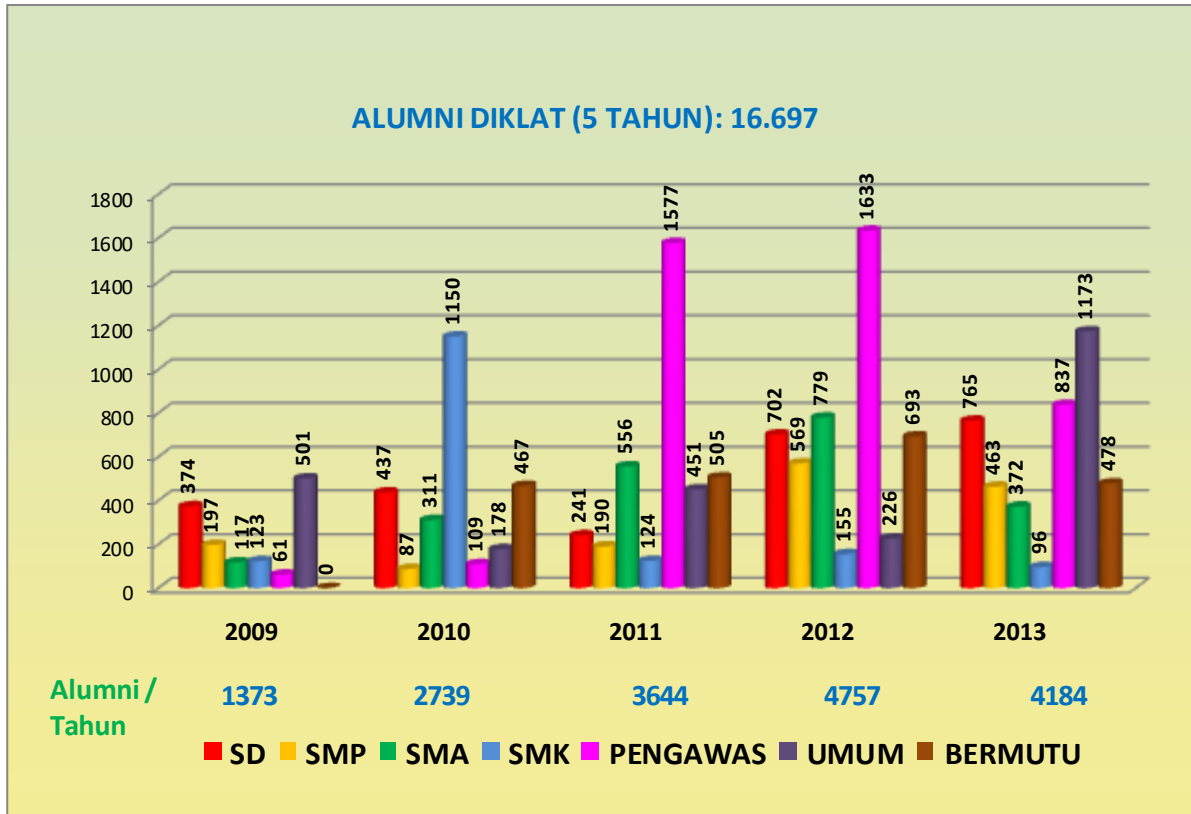
A. Kekuatan Lingkungan Internal

PPPPTK PKn dan IPS Malang memiliki kekuatan internal yang perlu disadari oleh semua pihak terkait dan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kekuatan itu terdiri dari:

1. Peningkatan Kompetensi PTK

Berdasarkan data dari peserta Diklat Peningkatan Kompetensi PTK Bidang PKn dan IPS yang meliputi Bidang Studi IPS, Sosiologi, Antropologi, Geografi, Sejarah, Ekonomi dan Akuntansi, dapat dilihat dalam grafik 1.

Grafik 1 : Peserta Diklat Tahun 2009 – 2013



2. Pengembangan Silabus Diklat

Bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan diklat salah satunya yaitu Silabus diklat yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Silabus yang telah disusun oleh PPPPTK PKn dan IPS tidak statis, didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi setiap saat dan perkembangan pendidikan yang menyangkut metode, evaluasi dan media.

PPPPTK PKn dan IPS telah menyiapkan silabus sesuai dengan jenjang sekolah yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK untuk kelompok IPS meliputi beberapa mata pelajaran yaitu Geografi, Sosiologi, Sejarah, Antropologi Ekonomi dan Akuntansi, disamping itu PPPPTK PKn dan IPS juga menyusun beberapa paket diklat yang terkemas secara sistematis dan menyusun berbagai macam Silabus untuk paket-paket diklat yang berbeda.

Silabus yang telah disusun oleh PPPPTK PKn dan IPS adalah sebagai berikut.

Tabel 1 : Silabus Diklat

No.	JUDUL SILABUS	JENJANG	POLA
1	Diklat PKn SD	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
2	Diklat PKn SMP	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
3	Diklat PKn SMA	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
4	Diklat PKn SMK	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
5	Diklat IPS SD	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
6	Diklat IPS SD	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	60 JP
7	Diklat IPS SMP	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
8	Diklat IPS SMK	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
9	Diklat Sejarah SMA	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
10	Diklat Sosiologi SMA	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
11	Diklat Ekonomi SMA	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
12	Diklat Geografi SMA	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
13	Diklat Antropologi SMA	Dasar, Lanjut, Menengah, Tinggi	120 JP
14	Diklat Pendidikan Karakter Bangsa	Tidak Berjenjang	60 JP
15	Diklat Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar Kelas 1,2,3.	Tidak Berjenjang	30 JP
16	Diklat Tematik Guru Sekolah Dasar	Tidak Berjenjang	12, 30, 60 JP
17	Diklat Manajemen Kepala Sekolah	Tidak Berjenjang	120, 60 JP
18	Pengintegrasian Jati Diri Bangsa (Character Building) Kedalam Mata Pelajaran PKn dan IPS	Tidak Berjenjang	60 JP
19	Diklat Pengawas Sekolah	Tidak Berjenjang	64 JP
20	TOT DD/CT	Tidak Berjenjang	100 JP
21	Diklat Pengembangan Model Pembelajaran	Tidak Berjenjang	60 JP
21	Diklat IPS SMK	Tidak Berjenjang	120 JP
22	Diklat Ekonomi M.A	Tidak Berjenjang	200 JP
23	Diklat Geografi M.A.	Tidak Berjenjang	200 JP
24	Diklat Sosiologi M.A	Tidak Berjenjang	200 JP
25	Diklat IPS MTs.	Tidak Berjenjang	200 JP
26	Peningkatan Imtaq (Integrasi Imtaq Dalam Pembelajaran)	Tidak Berjenjang	100 JP
27	Diklat Sistem Informasi Geografis	Tidak Berjenjang	100 JP
28	Diklat Pengintegrasian Pendidikan Multikultural Dalam Mata Pelajaran PKn-IPS	Tidak Berjenjang	60 JP
29	Diklat Aplikasi Komputer Dalam Akuntansi	Tidak Berjenjang	60 JP
30	Diklat Aplikasi Program Myop Pada Akuntansi	Tidak Berjenjang	60 JP
31	Silabus Diklat PAKEM Guru SD	Tidak Berjenjang	60 JP
32	Diklat Penerapan Matematika Dalam Ekonomi	Tidak Berjenjang	80 JP
33	Diklat Pengawas Ekonomi SMA	Tidak Berjenjang	60 JP
34	Diklat Pengintegrasian Imtaq Ke Dalam Mata Pelajaran PKn dan IPS	Tidak Berjenjang	60 JP
35	Diklat Demokrasi Ekonomi Indonesia	Tidak Berjenjang	40 JP
37	Silabus Diklat Penelitian Sosial	Tidak Berjenjang	60 JP
38	Diklat Pengintegrasian Pendidikan Budi Pekerti Kedalam Mata Pelajaran PKn dan IPS	Tidak Berjenjang	60 JP

2. Pengembangan Materi / Bahan Ajar

Untuk kebutuhan penyelenggaraan diklat PPPPTK PKn dan IPS berupaya menyusun beberapa materi/bahan ajar diklat bidang studi PKn dan IPS sesuai dengan silabus.

Materi yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pembuatan Bahan Ajar	44 judul	55 judul	20 judul	54 judul	50 judul

Tabel 2 : Pengembangan Materi bahan Ajar

3. Mengembangkan VCD pembelajaran interaktif dalam bidang PKn dan IPS

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi Pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama tersebut dan terintegrasi dalam kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PPPPTK PKn dan IPS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, telah menyusun beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan agar proses pembelajaran lebih dinamis.

Model-model yang telah dihasilkan PPPPTK PKn dan IPS dalam bentuk VCD adalah sebagai berikut;

Tabel 3 : VCD Pembelajaran

NO	LABORATORIUM	JUDUL VCD PEMBELAJARAN
1	SD	
	a. PKn	a. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning mata pelajaran PKn SD Kelas 4 b. Model Pembelajaran Cooperative Learning Teknik Picture and Picture SD Kelas 6
	b. Tematik	Model Pembelajaran Tematik SD Kelas Awal
2	SMP	
	a. PKn	Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan teknik Think Pair Share
	b. IPS	Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan teknik Jigsaw dan Debate
3	SMA	
	a. PKn	Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan pendekatan Teknik NHT
	b. Ekonomi	a. Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan teknik NHT b. Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan teknik Group Investigation
	c. Akuntansi	Model Pembelajaran Cooperative Learning dengan teknik STAD
	d. Geografi	a. Model Pembelajaran pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan teknik Concept Attainment dan Group Investigation b. Pembelajaran Geografi SMA dengan pendekatan Contextual Teaching and learning Metode Demonstrasi, Eksperimen dan diskusi
	e. Sejarah	a. Pembelajaran Sejarah Metode Sosio Drama b. Pembelajaran Berbasis Masalah
	f. Sosiologi	a. Model Pembelajaran dengan pendekatan DDCT Teknik Concept Attainment b. Model Pembelajaran dengan pendekatan DDCT Teknik Dua Tinggal Dua Tamu.
	g. Antropologi	Model Pembelajaran dengan pendekatan DDCT Strategi Pembelajaran Analisis Sosial Teknik Number Head Together
4	SMK	
	a. IPS	Model Pembelajaran Problem Based Learning

5. Instansi yang sudah dewasa

Berdiri tanggal 20 Mei 1981 sehingga sudah berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya lebih dari dua dasawarsa.

6. Kuantitas sumber daya manusia (SDM)

PPPPTK PKn dan IPS Malang memiliki karyawan terdiri dari:

- a. Golongan IV : 23 orang
- b. Golongan III : 65 orang
- c. Golongan II : 26 orang
- d. Golongan I : 3 orang

7. Lingkungan kampus yang menunjang

Kampus PPPPTK PKN dan IPS Malang berada di wilayah yang mudah dijangkau, lokasinya berdekatan dengan dua perguruan tinggi negeri yakni Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya.

B. Kelemahan Lingkungan Internal

PPPPTK PKn dan IPS Malang di dalam berperan serta mengembangkan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) menghadapi sejumlah kelemahan yang terdiri dari:

1. Kemampuan SDM yang ada

- a. Kualitas SDM yang ada perlu ditingkatkan
- b. Pendistribusian SDM kurang sesuai dengan kebutuhan

2. Sarana dan prasarana

- a. Kualitas sarana dan prasarana kurang memadai.
- b. Peralatan laboratorium untuk mendukung program lembaga masih kurang.
- c. Peralatan yang mendukung sistem komunikasi dan informasi, masih kurang.

3. Kuantitas dan kualitas pengkajian

- a. Kebijakan lembaga di bidang pengkajian dirasa masih kurang.
- b. Jumlah dan ragam penelitian pendidikan dan pengabdian masyarakat perlu ditingkatkan. Dalam periode 2010 – 2014 penelitian tentang pendidikan per tahunnya masih di bawah 10 kali.

4. Kerjasama dengan pihak lain

- a. Kerjasama masih terbatas dengan instansi pendidikan yang terkait.
- c. Belum memiliki Sekolah Model

C. Peluang Lingkungan Eksternal

Dalam lima tahun mendatang, pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja Lembaga, diperlukan suatu strategi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek.

PPPPTK PKn dan IPS Malang agar dapat berkembang serta terpercaya, harus dapat melihat dan memanfaatkan setiap kesempatan dan peluang yang ada. Peluang tersebut terdiri dari:

1. Program Diklat berskala nasional.
 - a. Berperan serta dalam berbagai kegiatan Diklat di lingkungan Kemendikbud dan di luar lingkungan Kemendikbud.
 - b. Adanya problema di bidang pendidikan yang dihadapi masyarakat.
2. Pengembangan pusat informasi ilmiah
 - a. Teknologi komunikasi melalui internet dan e-mail berlingkup global perlu dimanfaatkan sebagai sarana akademik dan media promosi.
 - b. Pengembangan penerbitan untuk pendidikan dan pusat informasi ilmiah kependidikan, baik secara konvensional dengan alat cetak maupun melalui media elektronik.
3. Penyelenggaraan forum ilmiah.
 - a. Adanya Undang Undang Guru yang menuntut peningkatan profesionalisme Guru.
 - b. Adanya problema masyarakat di bidang pendidikan.
4. Peningkatan penyelenggaraan kerjasama.
 - a. Peningkatan kerjasama perlu diadakan untuk meningkatkan peluang dan kemampuan berkembang bagi lembaga.
 - b. Peluang cukup terbuka untuk menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi di berbagai daerah.

D. Ancaman Lingkungan Eksternal

Kondisi eksternal yang dapat menghambat, yang merupakan “ancaman” bagi PPPPTK PKn dan IPS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Anggaran Pendidikan

anggaran pendidikan telah meningkat menjadi 20 % dari APBN. Akan tetapi kenaikan anggaran pendidikan tersebut diimplementasikan khusus untuk pemenuhan tunjangan profesi Guru, Kepala sekolah dan Pengawas, Dan tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas.

2. Otonomi Daerah

Dengan adanya Otonomi yang luas kepada daerah diatur dengan UU No. 22 Tahun 1999, lalu diatur lagi melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semula pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Keadaan ini mempunyai dampak bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri untuk meningkatkan mutu PTK nya, sedangkan itu koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.

3. Asean Economic Community (AEC)

Munculnya Asean Economic Community (AEC) 2015 adalah :

a. Free Movement of Goods and Services

Terjadinya pergerakan barang-barang dan jasa tanpa ada hambatan

b. Free Movement of Free Skill and Talented Labour

Terjadinya mobilitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk menemukan pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

c. Freedom of Establishment and Provision of Services and Mutual Recognition of Diplomas

Menjamin setiap warga negara ASEAN bebas membuka praktek layanan disetiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi kewarganegaraan.

d. Free Movement of Capital

Menjamin bahwa modal atau kapital akan dapat berpindah secara leluasa diantara negara-negara ASEAN yang secara teoritis memungkinkan terjadinya penanaman modal secara bebas dan efisien

C. Tantangan Kedepan

PPPPTK PKn dan IPS Malang dalam dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan lima tahun kedepan dijumpai sejumlah tantangan dari luar. Tantangan tersebut meliputi:

1. Pemberdayaan alumni diklat

Alumni diklat sebagai produk lembaga seharusnya dapat diberdayakan untuk mengaplikasikan hasil diklat serta kerjasama antara lembaga dengan alumni diklat bisa diwujudkan melalui kegiatan yang lebih terprogram.

2. Kurikulum 2013

Dalam program Implementasi Kurikulum 2013 menuntut perubahan perilaku guru yakni dengan melakukan pembelajaran dari guru aktif menjadi siswa aktif. Perubahan ini membutuhkan pembiasaan secara berkala baik melalui pelatihan maupun pendampingan. Dalam 3 tahun kedepan perlu adanya upaya yang serius untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru untuk menjawab keberhasilan Kurikulum 2013

3. Peran Provinsi dan Kabupaten/Kota

Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan dalam peningkatan kemampuan Guru khususnya dalam implementasi Kurikulum 2013 . Dominasi pembinaan masih dari Kemdikbud, sedangkan Dinas Kota / Kab merasa ditinggalkan

4. Distribusi Guru

Distribusi kualitas dan kuantitas Guru masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya pendidikan yang bermutu belum dapat dinikmati masyarakat di daerah yang jauh dari kota

5. Revitalisasi Peran

Lembaga pelaksana pemberdayaan PTK (LPMP dan PPPPTK) perlu direvitalisasi perannya dengan memperluas peran dan fungsi sampai menjangkau pembinaan sekolah sebagai satu kesatuan sistem peningkatan mutu

6. Meningkatkan kualitas pendidikan

Diklat Bidang studi perlu ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mampu bersaing secara global

7. Kemitraan

Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha/industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi.

8. Pendidikan Karakter Bangsa

Mengimplementasikan kebijakan yang mengintegrasikan muatan karakter bangsa, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan.

9. Teknologi Informasi

Mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang pendidikan.

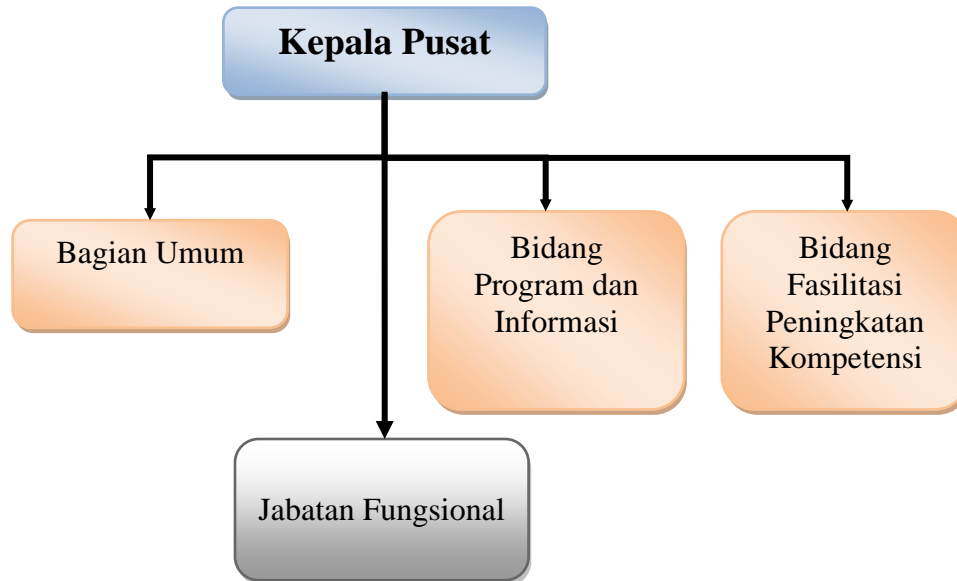
10. Perbaikan dan penataan ulang

Melakukan perbaikan dan penataan ulang kedalam, baik dalam hal sumberdaya manusia (SDM) maupun fasilitas dan infrastruktur.

D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK PKn dan IPS

Berdasarkan Permebdikbud nomor 41 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PPPPTK), PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugas di atas, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PPPPTK

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, menurut Permendikbud No 41 Tahun 2012, organisasi PPPPTK PKn dan IPS terdiri atas:

1. Kepala
2. Bagian Umum
3. Bidang Program dan Informasi
4. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Tugas dan fungsi :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran PPPPTK;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan.

2. Bidang Program dan Informasi

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, kerja sama antar lembaga serta pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan kerja sama antar lembaga di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3. Bidang Fasilitasi dan Peningkatan Kompetensi

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB III

VISI, MISI, NILAI-NILAI DAN TUJUAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI PPPPTK PKn dan IPS

a. Visi

Menjadi Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk menunjang kualitas kinerja lembaga.
- 2) Melaksanakan manajemen yang berbudaya kualitas, akuntabilitas dan demokratisasi.
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan pengembangan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS.
- 4) Melakukan pengembangan materi dan model-model fasilitasi pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS.
- 5) Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi kegiatan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS.
- 6) Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan instansi terkait.
- 7) Melaksanakan kerumahtanggaan lembaga berbasis kualitas *public service*.

B. TATA NILAI

Dalam melaksanakan program kerja yang sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, PPPPTK PKn dan IPS menyadari betapa pentingnya penetapan nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tata nilai yang telah ditetapkan diharapkan dapat menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun tata nilai yang dianut PPPPTK PKn dan IPS adalah :

1. Akuntabilitas

Adalah nilai yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di PPPPTK PKn dan IPS dapat dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan penyelenggaraan kegiatan.

2. Transparansi

Adalah nilai yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang/pegawai untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan di PPPPTK PKn dan IPS baik informasi tentang kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil-hasil kegiatan.

3. Demokrasi

Adalah nilai yang menjamin bahwa setiap orang/pegawai di lingkungan PPPPTK PKn dan IPS memiliki hak untuk terlibat dan memberikan masukan /penilaian dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di PPPPTK PKn dan IPS agar memperoleh hasil yang optimal.

4. Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan adalah nilai yang mengandung arti “*brotherhood*” atau ukhuwah, yang berarti dalam bekerja terkandung semangat kebersamaan, emansipasi, dan solidaritas. Asas kekeluargaan ini juga bukan merupakan asas keluarga atau asas kekerabatan yang nepotistik. Nilai ini berlaku bagi setiap orang/pegawai di lingkungan PPPPTK PKn dan IPS untuk menyelenggarakan setiap kegiatan di PPPPTK PKn dan IPS.

5. Belajar sepanjang hayat

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian

C. Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang dikembangkan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2015-2019 seperti yang tertera dalam gambar di bawah.



Gambar 3.2 Fokus RPJPN Pendidikan Nasional 2015-2019

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta mengacu pada Tujuan Badan PSDMPK dan PMP, yang diperlukan untuk menghasilkan layanan diklat yang prima untuk membentuk insan profesional. Tujuan strategis PPPPTK PKn dan IPS pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1. Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang PKn dan IPS
T2	Tersedianya sistem tatakelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima dalam pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bidang PKn dan IPS

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan ukuran ketercapaian dari setiap tujuan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan strategis adalah :

Tabel 3.2. Sasaran strategis dari tujuan strategis T1.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1-T1	100 % Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang PKn dan IPS meningkat kompetensinya
S2-T1	100% Sumberdaya pendukung program pelaksanaan diklat tersedia

Tabel 3.3. Sasaran strategis dari tujuan strategis T2

S1-T2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja P4TK sekurang-kurangnya 75
S2-T2	Realisasi penyerapan anggaran 95% setiap tahunnya

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PPPPTK PKN DAN IPS TAHUN 2015 – 2019

A. Strategi PPPPTK PKN dan IPS Tahun 2015 - 2019

Strategi pengembangan PPPPTK PKN dan IPS tahun 2015 – 2019 disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan yang ingin dicapai. Strategi merupakan upaya sistematis yang harus dilakukan berkaitan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Setiap strategi menjelaskan komponen-komponen layanan pendidikan dan latihan yang harus disediakan untuk mencapai tujuan strategis.

1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 1.

Tujuan strategis 1 dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

- a. Penyediaan SDM yang kompeten
- b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan diklat PTK
- c. Validasi data dan pemetaan kompetensi PTK
- d. Pengembangan program kerjasama
- e. Pengkajian dan pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model pembelajaran diklat untuk PTK SD, SMP, SMA dan SMK yang berbasis keunggulan lokal..
- f. Penyusunan rancangan program pendidikan dan latihan
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pencapaian tujuan strategis 1 akan dicapai melalui dua (2) sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ini akan dilaku secara bertahap. Pentahapan sasaran strategis 2 (S2) untuk mencapai tujuan strategis 1 (T1) dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1. Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1) dari Tujuan Strategis 1 (T1)

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
S1-T1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS meningkat kompetensinya	1	Guru yang mengikuti PPB sesuai jenjang diklat bidang studi PKn dan IPS	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		2	Kepala sekolah SD, SMP dan SMA yang mengikuti PPB kepala sekolah	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		3	Pengawas sekolah SD, SMP dan SMA yang mengikuti PPB kepengawasan sekolah	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		4	Tenaga Laboratorium di SMA yang mengikuti PPB pengelolaan laboratorium sekolah	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		5	Tenaga Kependidikan (Wakil Kepala sekolah, Ka.TU, Ketua Lab) bidang PKn dan IPS yang mengikuti PPB pengelolaan sekolah	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		6	Kelompok Kerja Guru (KKG) bidang studi PKn dan IPS yang diberdayakan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		7	Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bidang Studi PKn dan IPS yang diberdayakan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

Tabel 4.2. Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis 2 (S2) dari Tujuan Strategis 1 (T1)

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
S2-T1	Sumberdaya pendukung program pelaksanaan diklat tersedia	1	Ketersediaan perangkat pembelajaran sesuai jenis diklat, tiap tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
		2	Ketersediaan data PTK untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %
		3	Jumlah model dan /atau inovasi pembelajaran yang dikembangkan tiap tahun	30	30	30	30	30
		4	Jaringan kerjasama tingkat ASEAN (5 jenis kerjasama) dan Internasional (5 jenis) dalam 5 tahun	3	3	3	3	3
		5	Jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (271 PEMDA)	10	10	10	15	20
		6	Jumlah SDM Internal P4TK PKn dan IPS yang ditingkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi per tahun	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
		7	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Diklat	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis 2.

Tujuan strategis 2 dicapai dengan menggunakan strategi sbb :

- a. Penataan dan pengembangan organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta pengembangan peran PPPPTK PKn dan IPS
- b. Peningkatan mutu SDM, sarana prasarana, dan sistem manajemen
- c. Pengembangan sistem *reward and punishment* bagi SDM berprestasi dan bermasalah
- d. Pengelolaan lembaga yang memenuhi standar mutu internasional
- e. Penguatan akuntabilitas sistem keuangan lembaga
- f. Pengelolaan aset milik negara
- g. Penguatan sistem pengawasan internal

Pencapaian tujuan strategis 2 akan dicapai melalui dua (2) sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ini akan dilakukan secara bertahap. Pentahapan pentahapan sasaran strategis 2 (S2) untuk mencapai tujuan strategis 2 (T2) dapat dilihat pada table 4.4.

Tabel 4.4 . Pentahapan pencapaian sasaran strategis 1 (S1) dari tujuan 2 (T2)

KODE	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
S1-T2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja P4TK sekurang-kurangnya 75	1	Persentase Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu > 90%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		2	Persentase Tingkat Kesesuaian Laporan BMN dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu > 90%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		3	Persentase SDM PPPPTK PKn dan IPS yang hadir melaksanakan Tugas >98%	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
		4	Persentase (%) Penerapan e-Pengadaan adalah 100 Persen (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
S2-T2	Realisasi penyerapan anggaran 95% setiap tahunnya	1	Persentase daya-Serap Fisik dan Berdaya Serap Anggaran > 95%	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Dari kedua strategis yang dirumuskan untuk mencapai pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dirumuskan **strategi umum** seperti yang dituangkan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5. Strategi Umum

NO	KOMPONEN SISTEM PPPPTK	KODE	STRATEGI UMUM
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SU 1	Peningkatan profesional berkelanjutan bagi guru
		SU 2	Peningkatan profesional berkelanjutan bagi tenaga kependidikan
2	SDM PPPPTK	SU 3	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM PPPPTK PKn dan IPS
3	Kerjasama	SU 4	Pengembangan kerjasama
4	Tata kelola	SU 5	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan PPPPTK PKn dan IPS
		SU 6	Penguatan akuntabilitas pengelolaan asset milik negara

B. Arah Kebijakan PPPPTK PKn dan IPS Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan strategi umum pada bagian sebelumnya, dapat dirumuskan arah kebijakan pengembangan PPPPTK PKn dan IPS sampai dengan tahun 2019. Arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Keterkaitan arah kebijakan dengan strategi umum

NO	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan profesional berkelanjutan bagi guru	a. Pemetaan kompetensi Guru (Hasil uji kompetensi dan hasil penilaian kinerja guru) b. Penyusunan standar, prosedur, program, bahan dan model pembelajaran diklat untuk Guru c. Diklat guru
2	Peningkatan profesional berkelanjutan tenaga kependidikan	a. Pemetaan kompetensi tenaga kependidikan (Hasil penilaian kinerja pengawas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya) b. Penyusunan standar, prosedur, program, bahan dan model pembelajaran diklat untuk tenaga kependidikan c. Diklat penguatan pengawas d. Diklat penguatan kepala sekolah e. Diklat tenaga kependidikan lainnya
3	Peningkatan kompetensi SDM PPPPTK PKn dan IPS	a. Diklat/sort course b. Magang, c. Seminar, d. Benchmarking e. Penulisan karya ilmiah, f. Pengembangan inovasi
4	Pengembangan kerjasama	a. Kerjasama dengan dinas pendidikan Propinsi/Kab/Kota dalam rangka diklat pendidik dan tenaga kependidikan b. Kerjasama dengan institusi lain yang relevan, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga
5	Penguatan akuntabilitas system keuangan PPPPTK PKn dan IPS	a. Koordinasi dengan Badan PSDMPK dan PMP b. Sistem administrasi keuangan c. Pelaksanaan penjaminan mutu sistemn manajemen
6	Penguatan akuntabilitas pengelolaan asset milik negara	a. Sistem administrasi asset milik negara

BAB V

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PPPPTK PKN DAN IPS TAHUN 2015 - 2019

Kegiatan merupakan penjabaran dari misi, tujuan, dan sasaran. Kegiatan ini dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan dibatasi oleh waktu.

Kegiatan PPPPTK PKN dan IPS yang berkaitan langsung dengan Program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan peningkatan layanan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan layanan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Tujuan dan sasaran strategis dalam pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pada PPPPTK PKN dan IPS tahun 2015-2019 akan dicapai melalui **3 Kegiatan**, seperti yang tertuang pada tabel 5.1

Tabel 5.1. Kegiatan PPPPTK PKN dan IPS Tahun 2015 – 2019

KODE	KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON III
K 1	Peningkatan layanan pengembangan program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang Program dan Informasi
K 2	Peningkatan layanan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi
K3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PPPPTK	Bagian Umum

Untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran strategis PPPPTK PKN dan IPS, maka perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan PPPPTK PKN dan IPS tahun 2015-2019.

Tabel 5.2 : Program pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan

NO	INDIKATOR	OUTPUT	SATUAN	KONDI SI AWAL (2015)	TAHUN					
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	1. Tersedianya SDM yang kompeten	(1)	Tersedianya Widyaiswara PKn	Orang	11	15	15	1		
		(2)	Tersedianya Widyaiswara IPS (Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi)	Orang	19	24	34	41		
		(3)	Tersedianya Tenaga Administrasi	Orang	87	87				
		(4)	Tersedianya Tenaga Pustakawan	Orang	1	3				
		(5)	Tersedianya Tenaga Laboran	Orang	9	9				
	2. Tersedianya Manajemen Berbasis Pelayanan Prima	(1)	Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi perencanaan serta pelaksanaan program dengan instansi horizontal maupun vertikal.	Keg	12	36	48	48	48	48
		(2)	SAI dan LAKIP disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keg	2	2	2	2	2	2
		(3)	Pengelolaan Manajemen berdasarkan ISO 9001:2008	Keg	4	4	4	4	4	4
	3. Tersedianya Jaringan Kemitraan yang memadai	(1)	Terjalannya Mitra Kerjasama dengan Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota dan Badan Tingkat daerah dalam rangka Peningkatan Kompetensi PTK PKn IPS	Keg	1	10	10	10	10	10
		(2)	Terjalannya kerjasama dengan Kementerian Agama di Provinsi / Kabupaten / Kota dalam rangka peningkatan PTK PKn IPS	Keg	0	1	1	1	1	1
		(3)	Terjalannya Kerjasama dengan Dunia Usaha/LSM /NGO dalam Peningkatan Kompetensi PTK PKn IPS	Keg	1	5	5	5	5	5
		(4)	Terjalannya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam Peningkatan Kompetensi PTK PKn IPS	Institusi	5	5	5	5	5	5
	4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan peningkatan kompetensi PTK PKn IPS	(1)	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor (Asrama, Gedung-gedung Penunjang, dan sarana lainnya)	Unit	6	6	9	10	14	19
		(2)	Tersedianya fasilitas Pendidikan (komputer, media belajar)	Unit	8	8	8	8	8	8
	5. Tersedianya buku perpustakaan/ Bahan ajar yang memadai	(1)	Tersedianya buku -buku yang menunjang peningkatan kompetensi PTK PKn IPS	Judul	1275	1295	1345	1395	1445	1490
(2)		Tersedianya bahan diklat jenjang dasar, lanjutan, menengah dan tinggi	Paket	585	585	585	585	585	585	

NO	INDIKATOR	OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TAHUN					
					2015	2016	2017	2018	2019	
	6. Tersedianya silabus, model-model pembelajaran, dan Instrumen evaluasi peningkatan kompetensi PTK.	(1)	TNA PKn IPS	Keg	1	1	1	1	1	1
		(2)	Tersedianya silabus, (Tematik, PKn, IPS) peningkatan kompetensi PTK PKn IPS jenjang dasar, lanjut, dan pengembangan untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	Paket	2	32 (10 MA PEL X 3 JENJANG + ks + ps	32	32	32	32
		(3)	Tersedianya model pembelajaran, (Tematik, PKn, IPS) peningkatan kompetensi PTK PKn IPS untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	Paket	0	10 (MA PEL)	10	10	10	10
		(4)	Tersedianya instrument evaluasi, (Tematik, PKn, IPS) peningkatan kompetensi PTK PKn IPS jenjang dasar, lanjutan, menengah dan tinggi untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	Paket	166	166	166	166	166	166
1.	7. Penyediaan model-model Peningkatan kompetensi PTK jarak jauh	(1)	Pengembangan modul pembelajaran jarak jauh	Paket	3	3	10	10	10	10
		(2)	Mengunggah modul modul pembelajaran di web-site	Paket	50	3	10	10	10	10
		(3)	Mengunggah bahan ajar di website	Judul	50	50	50	50	50	50
		(4)	Melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota dan LPMP	Bidang Studi	0	0	3	3	3	6
		(5)	Pengembangan sarana prasarana pendukung	Paket	0	1	1	1	1	1
	8. Perluasan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK	(1)	Pengembangan model-model diklat peningkatan Kompetensi PTK PKn IPS	Paket	2	2	3	3	3	3
		(2)	Koordinasi sistim pelayanan dalam peningkatan kompetensi dan profesional berkelanjutan jenjang pendidikan dasar dan menengah	Paket	1	1	1	1	2	2
		(3)	Fasilitasi untuk daerah terpencil, daerah perbatasan dan daerah konflik	Keg	0	0	0	0	3	6
	9. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan media cetak dan eletronik dalam peningkatan	(1)	Membangun jaringan Online dengan instansi vertikal dan horizontal	Instansi	15 (p4tk, badan, kementrian	15	15	15	15	15
		(2)	Penguatan sistem jaringan	Instansi	83	83	117	117	117	117

NO	INDIKATOR	OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
	kompetensi PTK PKn IPS			15 + 30 lpmp + 38 dinas jatim)		15 + 30 lpmp + 38 dina s jatim + 34 prOp)			
		(3)	Mengembangkan media cetak dan elektronik untuk peningkatan kompetensi PTK PKn dan IPS	Jenis	5 (vcd, brosur, buku, website, majalah)	5	5	5	5
	10.Peningkatan Pemberdayaan KKG, MGMP, KKKS dan KKPS/KKPBS	(1)	Melakukan komunikasi akademik dengan KKG, MGMP, KKKS dan KKPS/KKPBS dalam peningkatan kompetensi PTK	Keg	0	4 Masi ng2 keg di loka si)	4	4	4
11.Peningkatan kualitas Widya Iswara	(1)	Peningkatan kualifikasi WI bergelar Doktor untuk mata pelajaran PKn	Orang	0	1	2	0	0	0
	(2)	Peningkatan kualifikasi WI bergelar Doktor untuk mata pelajaran IPS	Orang	2	3	0	0	0	0
	(3)	Peningkatan kompetensi profesional bagi WI untuk pengelolaan pembelajaran	Orang	22	26	26	29	50	65
	(4)	Peningkatan kompetensi profesional bagi WI untuk pengembangan penelitian (TOT)	Orang	2	3	3	3	6	6
	(5)	Peningkatan kompetensi profesionalisme bagi WI untuk pengembangan inovasi berwawasan lingkungan, imtaq.	Orang	22	26	26	29	50	65
	(6)	Peningkatan kompetensi profesionalisme bagi WI dalam berbahasa Inggris mencapai skor TOEIC 600 dan atau skor TOEFL 500	Orang	0	0	0	0	25	50
	(7)	Peningkatan kompetensi profesionalisme bagi WI melalui study banding baik bertaraf nasional maupun internasioanl	Orang	2	0	0	0	5	10
	(8)	Peningkatan kompetensi	Orang	20	40	40	40	40	40

NO	INDIKATOR	OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
		profesionalisme bagi struktural / administrasi untuk pengembangan TIK							
		(9) Peningkatan kompetensi profesionalisme bagi Struktural/Administrasi melalui study banding baik bertaraf nasional maupun internasional	Orang	0	0	0	0	6	6
	12. Mengembangkan dan mengoptimalkan peran laboratorium dalam peningkatan kompetensi PTK PKn dan IPS	(1) Melengkapi sarana prasarana laboratorium PKn dan IPS	Lab	7	7	7	7	7	7
		(2) Inovasi Program peningkatan Kompetensi PTK PKn dan IPS	Paket	7	7	7	7	7	7
	13. Meningkatkan kualitas dan relevansinya bahan pustaka berbasis kebutuhan pengguna (pelanggan)	(1) Menginventarisir kebutuhan bahan pustaka dari peserta diklat, pelanggan dan pegawai	bulan	12	12	12	12	12	12
		(2) Menambah kebutuhan bahan pustaka	Exp	7.693	8.563	8.613	8.689	8.739	8.789
		(3) Mengolah bahan pustaka sesuai standart yang ada (digital library)	exp	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	14. Mengembangkan dan melaksanakan budaya pelayanan berbasis kepuasan pelanggan	(1) Penyediaan Widyaiswara, Narasumber, Pakar sesuai dengan kriteria standart diklat	Orang	42 21 mapel x 2 org/kls	42	60 12 mapel x 5 org	60	60	60
	15. Menyusun dan menyempurnakan silabi, materi, media, instrumen evaluasi dan model-model peningkatan kompetensi PTK PKn dan IPS	(1) Pengembangan dan Penyempurnaan silabus, model-model pembelajaran, dan Instrumen evaluasi peningkatan kompetensi PTK PKn IPS jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Paket	3	3	12	12	12	12
	16. Pendampingan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS Mata Pelajaran PKn dan IPS	(1) Memberikan bimbingan teknis, supervisi, peningkatan kompetensi PTK di KKG, MGMP, Mata Pelajaran PKn dan IPS	Keg	0	4 Masing2 keg di loka si)	4	4	4	4
	17. Fasilitas peningkatan kompetensi guru PKn dan IPS di	(1) Pemetaan guru PKn dan IPS di sekolah negeri dan swasta	Paket	1	1	1	1	1	1
		(2) Pemetaan Forum Komunikasi guru PKn dan IPS :	Kelompok	0	2	2	2	2	2

NO	INDIKATOR	OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
	sekolah negeri dan swasta (umum dan kejuruan, tutor paket A, B, dan C)	<ul style="list-style-type: none"> • KKG • MGMP 							
		Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru PKn dan IPS negeri maupun swasta	Orang	48.202	48.202	950 (10 mapel x 40 X 2 AN GK) + ETR AIN ING 3 LAB 150 ORG	950	950	950
	18. Fasilitas peningkatan kompetensi Pengawas Sekolah bidang studi IPS dan PKn	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi Pengawas bidang studi PKn dan IPS	Orang	8.804	8.804	160 (2 X 40 X 2 AN GK)	160	160	160
		Melakukan evaluasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme Guru dan Pengawas Pengawas bidang studi PKn dan IPS	Keg	21	21	12	12	12	12
	19. Terjadinya percepatan informasi hasil diklat PKn dan IPS melalui alumni kepada PTK	Pemberdayaan alumni diklat	Orang	441 (alumni IN)	441	285 (30 % x 950)	285	285	285
		Penerbitan Buletin	Paket	2	2	2	2	2	2
	20. Meningkatkan kinerja guru PKn dan IPS dalam proses pembelajaran	Melakukan monitoring peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK	Keg	2	2	2	2	2	2
		Melakukan pembimbingan dalam proses pembelajaran	Keg	2	2	2	2	2	2
	a. Meningkatkan kinerja guru PKn dan IPS yang telah terimbas dari alumni	Melakukan monitoring peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK	Keg	1	1	1	1	1	1
		Melakukan komunikasi dengan guru-guru yang telah mendapatkan pengimbasan dari alumni	Keg	1	1	1	1	1	1

Keterangan:

Jenis Diklat yang akan diselenggarakan

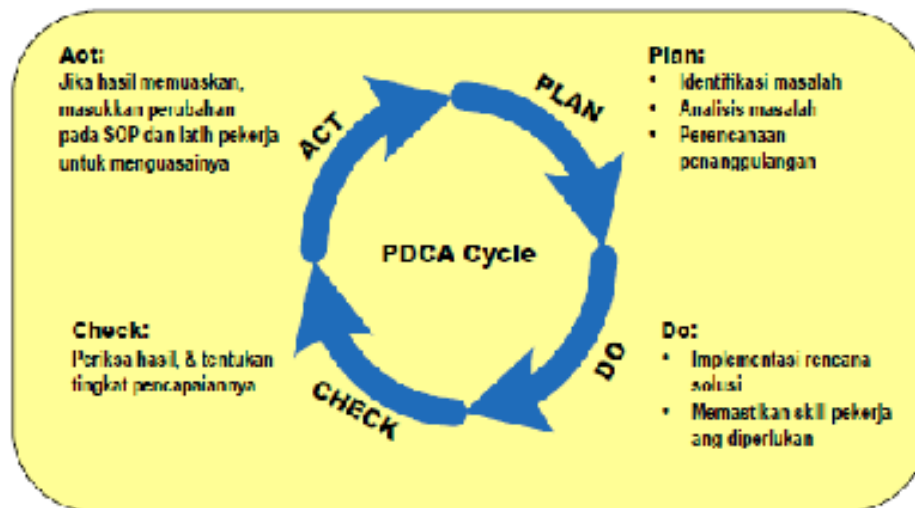
- a. PKn SMP
- b. PKn SMA / SMK
- c. IPS SMP
- d. Geografi
- e. Antropologi
- f. Sosiologi
- g. Ekonomi
- h. Sejarah SMA / SMK
- i. Tematik Kelas Rendah
- j. Tematik Kelas Tinggi / Terpadu
- k. KS
- l. PS

BAB VI

PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN RENSTRA PPPPTK PKn dan IPS

Sistem penjaminan mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Sistem penjaminan mutu bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program secara berkaladan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan adalah serentetan proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program dan lembaga pendidikan. Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan.

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan dengan melalui kegiatan yang diawali dengan perencanaan (Plan), pelaksanaan (Do), pemantauan (check), dan melakukan tindakan perbaikan (Action). PDCA (Plan, Do, Check, Action) merupakan model empat langkah untuk membuat peningkatan mutu bagi organisasi. Sebagai siklus tanpa akhir, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, PDCA harus diulang terus-menerus sehingga perbaikan yang dicapai menjadi tanpa henti.



Gambar 6.1 Siklus PDCA

Konsep siklus PDCA pertama kali diperkenalkan oleh Walter Shewhart pada tahun 1930 yang disebut dengan “Shewhart cycle“. PDCA, singkatan bahasa Inggris dari "Plan, Do, Check, Act" ("Rencanakan, Kerjakan, Cek, Tindak lanjut"), adalah suatu proses pemecahan masalah empat langkah interatif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Selanjutnya konsep ini dikembangkan oleh Dr. Walter Edwards Deming yang kemudian dikenal dengan ” The Deming Wheel”(Tjitro, 2009)

Metode ini dipopulerkan oleh W. Edwards Deming, yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas modern sehingga sering juga disebut dengan siklus Deming. Deming sendiri selalu merujuk metode ini sebagai siklus Shewhart, dari nama Walter A. Shewhart, yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas statistis. Siklus PDCA berguna sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem sehingga mutu pelayanan pendidikan dan pelatihan bisa berjalan dengan baik. PDCA merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja dan perbaikan kerja yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan mutu pelayanan. Siklus PDCA digunakan dalam pelayanan diklat untuk penyelesaian masalah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan diklat.

A. Perencanaan (Plan)

Tahapan pertama adalah membuat suatu perencanaan dalam bentuk rencan strategis PPPPTK PKn dan IPS. Perencanaan merupakan suatu upaya menjabarkan cara penyelesaian masalah yang ditetapkan ke dalam unsur-unsur rencana yang lengkap serta saling terkait dan terpadu sehingga dapat dipakai sebagai pedoman. Hasil akhir yang dicapai dari perencanaan strategis adalah tersusunnya rencana strategis dalam lima tahun kedepan.

Rencana strategis terdiri atas setidaknya-tidaknya tujuh unsur rencana yaitu:

1. Judul rencana strategis
2. Pernyataan tentang macam dan besarnya program mutu yang dikembangkan
3. Rumusan tujuan, lengkap dengan target yang ingin dicapai (goal, objective, and target),
4. Kegiatan yang akan dilakukan (activities), dan penjadwalannya
5. Organisasi dan susunan personalia pelaksana (organization and personnels)

6. Biaya yang diperlukan (budget)
7. Tolak ukur keberhasilan yang dipergunakan (milestone).

B. Pelaksanaan (Do)

Tahapan kedua yang dilakukan ialah melaksanakan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini diperlukan suatu kerjasama dari para anggota dan pimpinan manajerial. Untuk dapat mencapai kerjasama yang baik, diperlukan keterampilan pokok manajerial, yaitu :

1. Keterampilan komunikasi (communication) untuk menimbulkan pengertian staf terhadap cara pencapaian sasaran mutu (indikator) yang akan dicapai
2. Keterampilan motivasi (motivation) untuk mendorong staf bersedia menyelesaikan cara mencapai sasaran mutu (indikator) yang telah direncanakan
3. Keterampilan kepemimpinan (leadership) untuk mengkoordinasikan kegiatan cara mencapai sasaran mutu (indikator) yang dilaksanakan
4. Keterampilan pengarahan (directing) untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan.

C. Pemantauan (Check)

Tahapan ketiga yang dilakukan ialah secara berkala melakukan pemantauan kemajuan dan hasil yang dicapai dan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pemantauan bisa menggunakan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Internal dan Eksternal Audit, Evaluasi Diri Lembaga, dan atau evaluasi kinerja lembaga. Tujuan dari pemantauan untuk mengetahui :

1. Sampai seberapa jauh pelaksanaan pencapaian sasaran mutu (indikator) telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Bagian mana kegiatan yang berjalan baik dan bagian mana yang belum berjalan dengan baik
3. Apakah sumberdaya yang dibutuhkan masih cukup tersedia
4. Apakah cara penyelesaian masalah yang sedang dilakukan memerlukan perbaikan atau tindakan lainnya.

Untuk dapat memeriksa pelaksanaan cara pencapaian sasaran mutu (indikator), ada dua alat bantu yang sering dipergunakan yakni:

1. Lembaran pemantauan (check list)

Lembar pemantauan adalah suatu formulir yang digunakan untuk mencatat secara periodik setiap kegiatan yang dilakukan. Langkah pembuatan lembar pemantauan adalah:

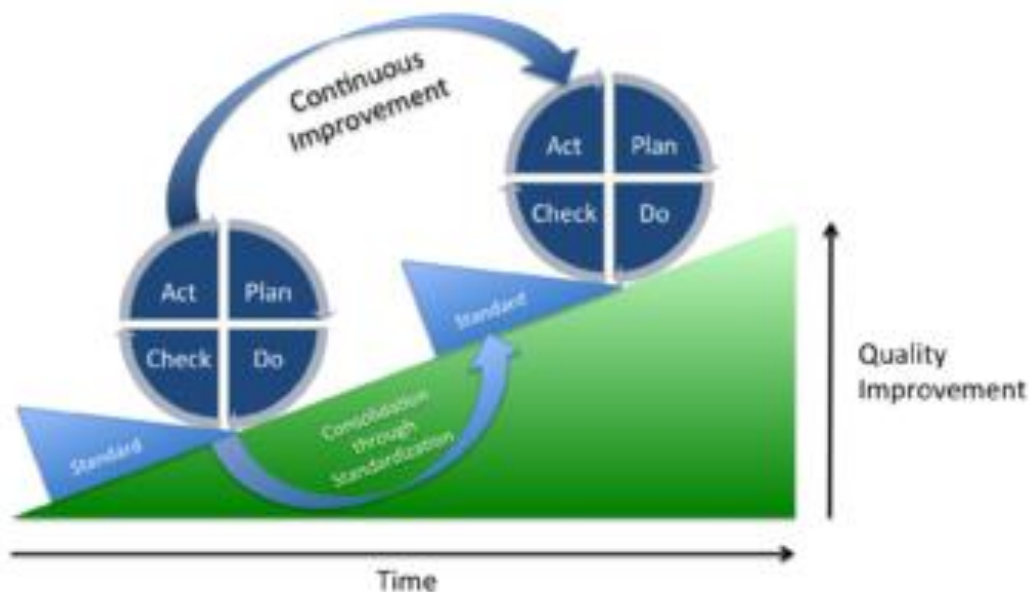
- Tetapkan jenis kegiatan yang diamati
- Tetapkan jangka waktu pengamatan
- Lakukan perhitungan kegiatan yang tidak sesuai dengan sasaran mutu (indikator)

2. Peta kontrol (control diagram)

Peta kontrol adalah suatu peta / grafik yang menggambarkan besarnya penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Peta kontrol dibuat berdasarkan lembar pemantauan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan peta kontrol adalah :

- Tetapkan garis penyimpangan/ketidaksesuaian minimum dan maksimum
- Tentukan prosentase penyimpangan/ketidaksesuaian
- Buat grafik penyimpangan/ketidaksesuaian
- Nilai grafik

Satuan pendidikan penyelenggara diklat harus menyadari bahwa sistem penjaminan mutu lembaga perlu dilaksanakan secara terus –menerus dalam siklus empat langkah PDCA. Dalam langkah tersebut, kendali mutu termasuk langkah ketiga, yaitu Check, yang berfungsi untuk melihat kondisi saat ini guna dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan.



Gambar 6.2 Peningkatan Berkelanjutan

Jika antara kedua kondisi tersebut terdapat kesenjangan, maka perlu dilakukan koreksi pelaksanaan program, direncanakan kembali langkah-langkahnya, dan dikerjakan langkah yang telah direncanakan. Terkait dengan peningkatan mutu yang tanpa henti, kondisi yang diinginkan dapat ditingkatkan jika dianggap telah tercapai. Dengan demikian maka pengendalian memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan mutu pendidikan.

D. Perbaikan (Action)

Tahapan keempat yang dilakukan adalah melaksanakan perbaikan rencana strategis. Lakukanlah penyempurnaan rencana strategis atau bila perlu mempertimbangkan pemilihan dengan cara penyelesaian masalah lain. Untuk selanjutnya rencana strategis yang telah diperbaiki tersebut dilaksanakan kembali.

Tahap Tindak Lanjut diimplementasikan dengan membuat usulan standard dan menetapkan langkah selanjutnya berdasarkan temuan dari tahap "pemantauan".

Implementasi tahap ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana tindak lanjut untuk menjadi lebih baik di kemudian hari dan melaksanakan keseluruhan rencana peningkatan perbaikan, termasuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan. Pada tahap ini ada kemungkinan dilakukan standarisasi ulang proses dan persiapan terhadap perbaikan berikutnya. Pada tahap ini, proses perbaikan yang terbaik efeknya terhadap program akan

digunakan/diterapkan dalam proses dan selalu dimonitoring kemudian distandarisasi sebagai suatu prosedur standar. Setelah proses/ proyek program mengalami perubahan baik dan stabil maka segera lakukan persiapan lagi untuk melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Dan begitu seterusnya. Pimpinan melaporkan, mempertanggung-jawabkan, menindaklanjuti, memperbaiki, dan meningkatkan performansi. Lebih dari itu, pimpinan memutuskan perubahan yang akan diimplementasikan; Bila berhasil, perlu disusun prosedur/program yang baku. Implementasi tahap ini memerlukan seperangkat alat bantu seperti pemetaan proses, standarisasi proses, informasi pengendalian, pelatihan formal untuk kepentingan standarisasi proses.

jokowin @ des 2014